

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan pembangunan fasilitas fisik kota yang pesat di Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi dalam kurun waktu yang panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Perkembangan Makassar terkait erat dengan perubahan politik dan ekonomi akibat campur tangan Eropa dan dinamika penguasa kerajaan Makassar.¹ Makassar sejak awal abad ke-20, telah berada dalam pusaran modernitas ala Hindia Belanda dengan hadirnya pemukiman yang tertata dan bersih, listrik, *Societeit de Harmonie*, dansa, pasar malam, kanal, jalan beraspal, hotel, arsitektur *avantgarde*, dan penataan desa (*kampung verbetering*) adalah hal yang modern.²

Penelusuran terhadap sejarah pertokoan di Kota Makassar mengungkap dinamika transformasi pola perdagangan yang signifikan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat dan proses modernisasi kota. Sejak abad ke-16, Makassar telah berkembang sebagai pelabuhan perdagangan utama, menarik pedagang dari berbagai wilayah seperti Malaka, Jawa, Cina, dan Eropa. Kehadiran mereka menjadikan Makassar sebagai pusat pertukaran komoditas strategis, termasuk rempah-rempah, beras, dan kain tenun.



¹ Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 13-

Ilham Daeng Makkelo. “Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Pada Abad Ke-20”. *Jurnal Sejarah*, Vol. 1(2), 2018, hlm. 49.

Perkembangan Makassar terus berlanjut sejak zaman kolonial hingga masa orde baru. Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat dan berkembang menjadi kota yang sangat besar melebihi kota-kota lainnya di Indonesia bagian timur. Percepatan perubahan tersebut salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi yang serba cepat.³ Salah satu ciri kota yang non-agraris tentu saja membuat penduduk kota mencari sektor perdagangan lainnya. Pada tahap awal perkembangan kota modern ditandai dengan perkembangan aspek material atas dasar pembangunan ekonomi. Penanda lainnya adalah wilayah perdagangan, baik berupa pasar maupun kawasan pertokoan.

Aktivitas berbelanja, yang awalnya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, telah mengalami evolusi menjadi bagian integral dari gaya hidup urban masyarakat Makassar. Perubahan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kota yang kini didominasi oleh sektor jasa, termasuk perdagangan besar dan eceran, serta jasa perusahaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, Makassar menarik migrasi penduduk dari berbagai daerah, mempercepat urbanisasi, dan mendorong transformasi menjadi kota metropolitan.⁴

Perubahan wajah Kota Makassar terjadi cukup signifikan dapat dilihat dari pembangunan fisik kota tersebut seperti pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas umum. Pasar, warung, toko, department store, shopping centre adalah bentuk organisasi tukar menukar ekonomi yang jelas akan berpengaruh atas



Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, m. 2).

Asmudandar, "Re-Identitas Kota Lama Makassar". *Jurnal Lensa Budaya*, 2020, hlm. 4.

permasalahan ekologi perkotaan.⁵ Pada masa pendudukan Jepang telah dibuka toko serba ada di Makassar yang menandai awal modernisasi sistem distribusi barang di wilayah tersebut. Tahun 1950-an disekitar Kawasan Pantai Losari menjadi pusat pertokoan modern. Langkah ini mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat urban yang berkembang pesat pada masa itu.

Pengembangan sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar berfungsi sebagai pintu gerbang utama dan pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur, memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis serta infrastruktur pelabuhan yang berkembang pesat. Dalam konteks perencanaan kota modern, ruang-ruang publik seperti plaza, taman kota, dan alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya dan simbol kekuasaan suatu kota. Kehadiran ruang-ruang tersebut mencerminkan peradaban dan perkembangan suatu wilayah.

Di Kota Makassar terdapat sebuah pusat perbelanjaan, dikenal sebagai Pasar Sentral Makassar, yang telah mengalami berbagai fase pembangunan dan renovasi sejak awal pendiriannya pada tahun 1960-an. Pada awalnya, pasar ini dirancang dengan konsep modern untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun, seiring berjalannya waktu, Pasar Sentral menghadapi berbagai tantangan yang berkelanjutan. Meskipun telah dilakukan beberapa kali renovasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, masalah



Ilham Daeng Makkelo. "Sejarah Perkotaan: Membayangkan Kota dan rafi Sejarah Perkotaan". *Jurnal Lensa Budaya*, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm.

seperti kebersihan yang kurang, bau tidak sedap, kondisi lantai yang licin, dan kurangnya jaminan keamanan tetap menjadi permasalahan yang sulit diatasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya modernisasi infrastruktur pasar belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan mendasar yang ada.⁶ Sehingga dalam perencanaan pembangunan sebuah pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan sangat diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan melihat kondisi social dan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain Pasar Sentral, kawasan Jalan Irian di Makassar juga berkembang sebagai pusat perbelanjaan yang strategis. Lokasinya yang berdekatan dengan Pelabuhan serta berbagai fasilitas seperti restoran, klub malam dan sebagainya, menjadikan kawasan ini sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang signifikan. Sementara itu, Pantai Losari yang terletak tak jauh dari jalan Irian telah menjadi ikon wisata dan ruang publik utama di Kota Makassar. Pantai Losari kini berfungsi tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai pusat komersial yang aktif dengan berbagai aktivitas jual beli yang berlangsung sepanjang hari. Menambah daya tarik kawasan ini sebagai ruang terbuka yang ramai dikunjungi warga untuk bersantai dan berinteraksi sosial.⁷

Variasi dalam bentuk dan konsep kawasan perdagangan di Makassar telah memengaruhi dinamika perkembangan, aktivitas ekonomi, serta dampak sosial di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang signifikan adalah kontribusi komunitas



Ilham. “Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar dan Orde Baru”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 24.

Ilham Daeng Makkello, *Menjadi Kota*, hlm. 53.

Tionghoa, yang secara historis mendominasi sektor perdagangan di Indonesia. Peran mereka tidak hanya terbatas pada kepemilikan toko, tetapi juga mencakup penguasaan distribusi komoditas penting seperti pangan, obat-obatan, dan tekstil sejak era kolonial Hindia Belanda. Dari uraian diatas, tulisan ini kemudian diberi judul **“Pusat Pertokoan Ujungpandang Tahun 1971-1997”**

1.2 Rumusan Masalah

Pusat Pertokoan Ujungpandang ini menjadi hal yang menarik untuk ditelisik lebih dalam karena merupakan pembangunan pertokoan bertaraf internasional pertama di luar Pulau Jawa. Meskipun begitu, pusat pertokoan ini terus berkelanjutan hingga akhir masa Orde Baru. Penulis kemudian merumuskan permasalahan penelitian **mengapa Pusat Pertokoan Ujungpandang masih terus bertahan dan berkelanjutan sepanjang periode 1971-1997?**

Untuk menjaga fokus dan konsistensi penulisan, dalam bahasan ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Makassar terhadap Pusat Pertokoan Ujungpandang?
2. Bagaimana perencanaan dan pengembangan Pusat Pertokoan Ujungpandang dalam periode 1971-1997?
3. Bagaimana dampak ekonomi, sosial dari keberadaan Pusat Pertokoan Ujungpandang terhadap perkembangan Kota Makassar?



1.3 Batasan Masalah

Sebuah tulisan sejarah harus memuat batas temporal (waktu) dan spasial (lokasi). Dalam kajian mengenai kota, batas administratif sering dijadikan dasar strategi penelitian, terutama jika menyangkut masalah kependudukan.⁸ Penulis memberikan batasan spasial suatu kawasan pusat pertokoan Kota Makassar, khususnya Jalan Irian.

Batasan temporal yang ditentukan penulis adalah tahun 1971-1997. Tahun tersebut dipilih karena pada tahun 1971, Pusat Pertokoan Ujung Pandang mulai dikembangkan secara signifikan. Kemudian dipilih tahun 1997 sebagai batas akhir karena pada tahun tersebut terjadi kerusuhan di Kota Makassar yang memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas perdagangan di Pusat Pertokoan Ujungpandang. Kejadian-kejadian tersebut berpengaruh terhadap aktivitas dan perkembangan Pusat Pertokoan Ujungpandang selanjutnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang pola pembangunan Kota Makassar di Pusat Pertokoan Ujungpandang.
2. Menjelaskan perencanaan pembangunan Pusat Pertokoan Ujungpandang.
3. Memberikan penjelasan mengenai dampak yang dihasilkan dari Pusat Pertokoan Ujungpandang tahun 1971-1997.



Kuntowijyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 60.

1.5 Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

1. Membantu dalam menggali peran dan kontribusi Pusat Pertokoan Ujungpandang dalam sejarah kota, serta hubungannya dengan perkembangan sosial dan ekonomi wilayah tersebut.
2. Sebagai bahan informasi bagi institusi pendidikan tinggi.
3. Sebagai ilmu dalam lingkup akademis dan upaya memahami sejarah Pusat Pertokoan Ujungpandang.
4. Memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca, khususnya tentang sejarah dan kegiatan di Pusat Pertokoan Ujungpandang.
5. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan merangsang penyelidikan literatur yang lebih mendalam dan memacu perkembangan penelitian sejarah di masa depan.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Relevan

Penyusunan skripsi ini digunakan beberapa sumber yang relevan dengan tema penelitian, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Buku H.M. Dg. Patompo. *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan: Fragmen Revolusi Pembangunan*. berisi tentang perjalanan H. M. Dg. Patompo sebagai Walikota Makassar, dimana program-program kerja yang dijalankannya seperti pembangunan fisik kota, sosial, dan ekonomi. Program ini bertujuan untuk



bangkan Kota Makassar menjadi sebuah kota lima dimensi yang p: kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademi, dan kota

pariwisata.

Jurnal Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20 oleh Ilham Daeng Makkelo menjelaskan modernitas dan perencanaan pembangunan Kota Makassar dari masa Kolonial hingga akhir abad-20. Pengaruh konsep perencanaan kota sangat dipengaruhi oleh perencanaan kota yang populer di Eropa. Sektor ekonomi berkembang sejalan dengan proses modernisasi di perkotaan. Seperti yang disebutkan Ilham, kota modern bahkan telah mengalami penurunan dan memberikan prioritas pada fungsi-fungsi jasa yang terkait dengan sector ekonomi modern.

Jurnal yang berjudul Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru oleh Ilham mengenai tantangan terkait pengaturan tata kota dan dinamika sosial yang menjadi sensitif karena peningkatan luasnya proyek modernisasi. Proyek-proyek pembangunan modernitas yang semakin meluas ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan di kota, termasuk pada tingkat paling dasar. Ini mencakup harmonisasi dan gerakan kolektif dalam proyek-proyek pembangunan kota, yang secara signifikan memengaruhi cara penggunaan dan struktur ruang kota, serta cara penduduk kota menjalani aktivitas sehari-hari.

Dari berbagai hasil penelitian di atas, penulis telah memperoleh gambaran mengenai bagaimana rencana dan kebijakan digunakan dalam mengembangkan tata ruang Kota Makassar selama masa pemerintahan Patompo. Peran serta kontribusi Patompo dalam merancang Kota Makassar sebagai pusat perdagangan juga telah

r. Namun, belum ada penelitian sebelumnya yang mengulas secara sensitif mengenai Pusat Pertokoan Ujungpandang, mulai dari fase awal



pembangunannya hingga akhir periode Orde Baru. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menghadirkan sebuah pandangan tentang faktor-faktor yang mendorong pembangunan Pusat Pertokoan Ujungpandang dan dampak yang dihasilkan.

1.6.2 Landasan Konseptual

Kota adalah suatu pusat kegiatan bagi penduduknya. Aspek fisik dari sebuah kota mencakup sarana, prasarana, dan infrastruktur yang mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakatnya.⁹ Perkembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, saluran air, dan perumahan dapat menyebabkan perubahan lingkungan di kota. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi penyebab utama pendirian industri-industri di kota.¹⁰ Begitu juga dengan pasar, warung, toko, *department store*, dan *shopping centre*, semuanya merupakan bentuk organisasi ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa, dan memiliki dampak yang signifikan pada masalah ekologi perkotaan.

Sistem perkotaan yang ideal terkait dengan perkembangan berbagai konsep kota, seperti kota pariwisata yang menarik perhatian wisatawan, kota industri yang menjadi pusat aktivitas industri dan produksi, dan konsep-konsep kota lainnya yang sesuai dengan tujuan dan peran masing-masing.¹¹ Kota dagang menjadi salah satu aspek yang sangat dominan, menggeser sistem kemasyarakatan agraris menjadi

⁹ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah*, hlm. 15.

Ilham Daeng Makkelo, *Sejarah Perkotaan*, hlm. 90.

Komaruddin, *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan* (Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Perkerjaan Umum, 1999),



sistem industri. Perubahan ekonomi dari yang sebelumnya didasarkan pada sumber daya alam menjadi didasarkan pada kapital. Proses perubahan yang drastis ini menyebabkan kota mengalami perubahan fisik dan manajemen yang signifikan.¹²

Mall atau pusat perbelanjaan atau pasar tradisional juga menjadi ciri khas bagi setiap kota dan akan menjadi daya tarik yang amat penting untuk daya Tarik wisata kota.¹³ Menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Pusat pertokoan sendiri diharapkan dapat menarik banyak pengunjung, termasuk wisatawan, sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan produk dan jasa di toko-toko dan bisnis di sekitarnya. Selain itu, kegiatan berbelanja juga berkontribusi pada pendapatan pajak bagi pemerintah daerah.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulis yaitu metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah memiliki lima tahap penelitian, yakni pemilihan topik, pencarian sumber melalui studi literatur dan wawancara, kritik sumber,

¹² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Problematikanya* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 50.

I Gusti Bagus Rai Utama. “Pengembangan Wisata Kota sebagai a Masa Depan Indonesia”. *Makalah pada: SEMINAR NASIONAL SPACE*, hlm. 2.



interpretasi dan penulisan sejarah.¹⁴ Dalam memilih topik, sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual penulis.¹⁵ Sebelum menentukan topik, penulis melakukan riset awal terhadap sejumlah topik yang menarik perhatian. Ini melibatkan membaca buku, artikel, dan berbagai sumber sejarah lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai wilayah dan periode dalam sejarah. Penulis juga mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber yang relevan untuk topik yang dipilih, termasuk memikirkan apakah terdapat cukup bahan sumber yang dapat mendukung penyelidikan lebih lanjut.

Akhirnya, sangat signifikan bagi penulis untuk memilih topik yang benar-benar sesuai minat. Keterlibatan emosional terhadap topik ini dapat berperan dalam mempertahankan motivasi dan semangat penulis selama melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini, topik yang diambil oleh penulis adalah sejarah kota. Pengumpulan sumber, tahapan ini merupakan pengumpulan sumber yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber yang penulis dapatkan di Kantor Arsip sebagai bahan awal untuk penulisan draft ini diantaranya yaitu Inventaris Arsip Kartografi dan Kearsitekturan Kota Madya Ujung Pandang periode 1949-1983, *Nomor Reg Ya 187* mengenai rencana sebuah rumah toko pada jalan Irian, berisi gambar denah, tampak dan tampilan penampang dari bangunan sebuah



Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, m. 69.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu*, hlm. 70.

rumah toko yang ingin didirikan pada jalan Irian tahun 1963.

Sumber-sumber pendukung yang relevan dengan penelitian ini menghimpun informasi dan peristiwa sejarah dari berbagai sumber tulisan, termasuk buku-buku yang tersedia di Perpustakaan FIB Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, juga dari toko buku dan sumber lainnya. Sumber sumber ini bertujuan untuk memperkuat atau membandingkan data dari sumber sumber utama yang telah diperoleh sebelumnya.

Selanjutnya verifikasi (kritik sumber), Setelah melakukan pengumpulan sumber tahap berikutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber yang terbagi menjadi dua yaitu, kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern mempertanyakan kebenaran materi atau mempertanyakan apakah sumber yang benar-benar dibutuhkan. Kritik intern mempertanyakan kebenaran isi atau relevansi sumber informasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini, penulis memilih sumber yang tepat untuk membantu penulis dalam penelitiannya dan mengkritisi kembali data untuk mendapatkan fakta yang relevan dengan penelitian ini.

Tahap ketiga interpretasi, yaitu Pada bagian ini penulis menganalisis fakta-fakta atau sumber-sumber sejarah yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan mengenai inti dari fakta-fakta sejarah tersebut. Penulis mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang ada. Adapun pendekatan menganalisis masalah penelitian adalah sejarah kota karena ini berkaitan dengan perdagangan di wilayah tersebut.



Tahap akhir dari proses penelitian sejarah adalah penulisan sejarah dimana data yang telah dikumpulkan dan diuji kebenarannya kemudian dirangkai

dan dituangkan dalam tulisan sejarah. penyusunan tulisan, di mana data yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan ditafsirkan menjadi bahan utama. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah yang dipilih serta berbagai sumber akan diatur dalam bentuk narasi sejarah tertulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam proses penelitian sejarah, penting untuk mengikuti struktur penulisan yang teratur. Tujuannya adalah agar penyajian informasi lebih terstruktur. Penulis telah mengatur isi tulisan ini dalam lima bab, yang tertera sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pendekatan konseptual, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang gambaran umum Kota Makassar.

Bab III mencakup pembahasan proses perencanaan, tantangan yang dihadapi, serta menggambarkan peran oleh berbagai pihak dalam merencanakan pembuatan pusat pertokoan di jalan Irian.

Bab IV membahas mengenai dampak yang terjadi setelah pusat pertokoan Ujung Pandang di jalan Irian dibangun pada tahun 1971-1997. Dampak yang dibahas meliputi perdagangan, pariwisata, dan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitar jalan Irian.

Bab V merupakan simpulan berupa hasil yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR

2.1 Sejarah Singkat Kota Makassar

Pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Makassar telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting bagi berbagai bangsa Eropa dan Tiongkok. Pada masa pemerintahan Tunipalangga Ulaweng Raja Gowa ke-X (1546–1565), Gowa-Tallo menjadi pelabuhan utama yang disinggahi oleh kapal-kapal dagang, khususnya setelah jatuhnya Melaka di bawah kekuasaan Portugis ke tangan Belanda pada tahun 1641. Kondisi ini mendorong Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk mempererat hubungan perdagangan dengan Makassar sekaligus mendirikan kantor perwakilan dagangnya di wilayah tersebut. Selain VOC, bangsa Inggris pada tahun 1613, Spanyol pada tahun 1615, Denmark pada tahun 1618, dan Tiongkok pada tahun 1619 juga membentuk perwakilan dagang di Makassar.¹ Pada masa ini, istilah "Makassar" kerap digunakan untuk merujuk kepada Kesultanan Gowa.

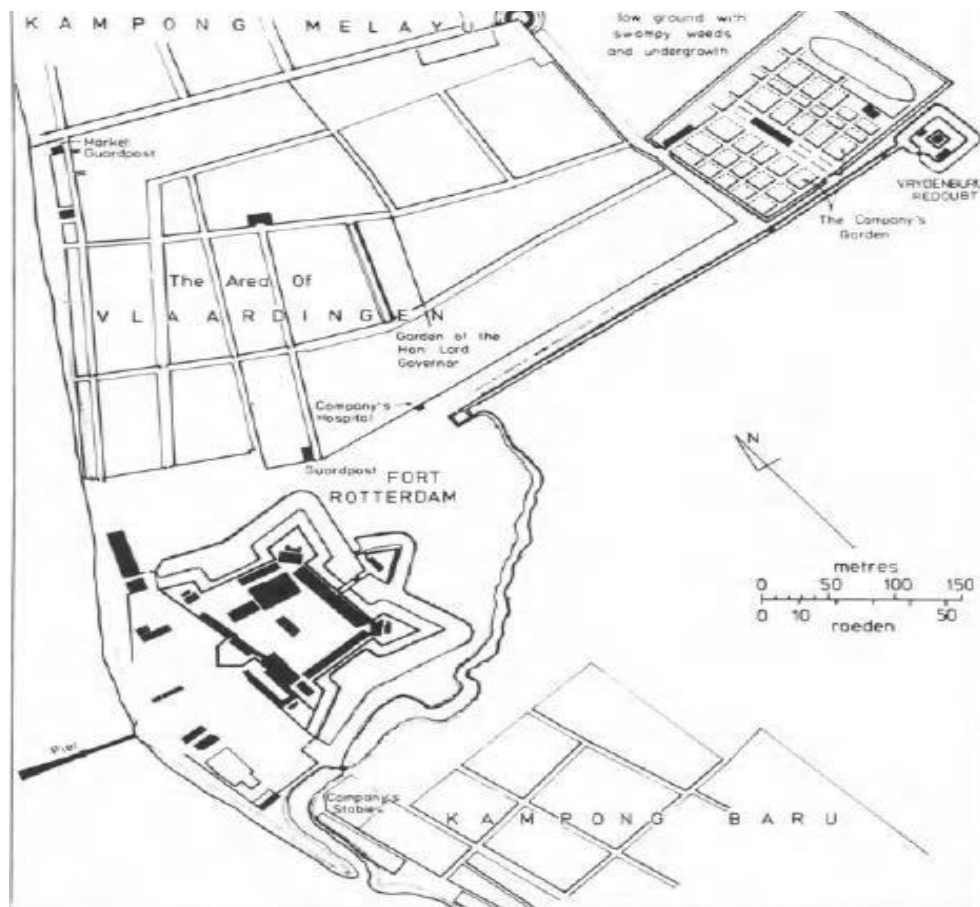
Setelah berhasil menang dari peperangan melawan Gowa-Tallo, Belanda menetapkan Benteng Ujungpandang sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan. Speelman, yang menjadi pemimpin baru di Makassar, memilih kawasan sekitar benteng tersebut sebagai lokasi permukiman baru. Keputusan ini diambil karena kondisi alamnya yang mendukung, letaknya yang strategis, serta potensinya sebagai

...n yang lebih baik dibandingkan benteng lainnya. Benteng Ujungpandang

Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka 004), hlm. 155-156.



kemudian diberi nama baru yaitu "Rotterdam" sebagai penghormatan terhadap kota kelahiran Speelman. Rotterdam pun dijadikan sebagai markas militer dan kantor VOC di wilayah timur nusantara. Seiring waktu, wilayah di sekitar benteng yang dikenal dengan nama *Stad Vlaardingen* mulai dipadati oleh sekutu Belanda dari berbagai kelompok etnis.



Gambar 2.1 Peta Benteng Rotterdam dan Sekitarnya pada abad ke-17.

Sumber : Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth century*. Map 5.



Speelman membagi wilayah Makassar ke dalam empat kawasan utama. Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam, dibangun dengan tembok batu besar serta dilengkapi dengan pembagian ruang, blok-blok, dan pintu gerbang. Area di sekitar benteng ini menjadi kawasan khusus untuk pemukiman warga Belanda, yang dihuni oleh pejabat, pegawai administrasi, dan tentara VOC. Kedua, di timur laut Benteng Rotterdam berkembang permukiman yang dikenal sebagai "perkampungan pedagang" atau *Negory Vlaardingen*, tempat tinggal para pendatang dan orang asing. Penghuninya terdiri dari para pedagang Eropa, warga Tionghoa, serta penduduk lokal beragama Kristen. Ketiga, terdapat Kampong Melayu yang terletak di utara Vlaardingen, dan menjadi bagian penting dalam tatanan permukiman inti Kota Makassar. Nama kawasan ini mencerminkan asal-usul etnis penghuninya, yakni masyarakat Melayu. Keempat, Kampong Beru atau Kampung Baru yang berlokasi di sebelah selatan Benteng Rotterdam, berdekatan dengan garis pantai.²

Pada masa pemerintahan kolonial, Makassar tidak hanya memainkan peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam sistem administrasi pemerintahan kolonial di wilayah timur Hindia Belanda. Tiga tahun setelah diberlakukannya *Decentralisatiewet* tahun 1903 oleh Gubernur Jenderal Idenburg, dan setelah proses penaklukan terhadap kekuasaan lokal diselesaikan, Makassar diresmikan sebagai sebuah *gemeente* atau pemerintahan kota yang memperoleh hak untuk mengatur dan mengelola urusan



Asmunandar. "Re-Identitas Kota Lama Makassar". *Jurnal Lensa Budaya*, 2020, hlm. 3.

pemerintahan secara otonom. Pada tahun 1918, struktur pemerintahan tersebut semakin berkembang dengan dibentuknya jabatan walikota. Kemudian, pada tahun 1938, status Makassar ditingkatkan menjadi *stadsgemeente* atau kotapraja, yang disertai dengan perluasan wewenang administratif serta penambahan jumlah anggota dewan kota.³



Gambar 2.2 Peta Kotapraja Makassar sebelum diperluas Tahun 1971.



Dias pradadimara, *Dari Makassar ke Makassar: Proses Etnisasi Sebuah* lam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, Kontinuitas dan n dalam Sejarah Sulawesi Selatan (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 188-

Sumber : H.M. Dg Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan: Fragmen Revolusioner Pembangunan (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater Ujung Pandang. 1976)*, hlm. 8.

Kedudukan pemerintah Kolonial Belanda berakhir pada tahun 1942 dan ditandai dengan kedatangan Jepang di Indonesia pada bulan Februari. Untuk menduduki wilayah Makassar pasukan Jepang terlebih dahulu mendarat di Malino dan sebagian lagi di Australia.⁴ Semenjak Jepang menduduki Kota Makassar, tidak begitu banyak membawa perubahan di bagian pemerintahan, hanya terdapat pergantian nama-nama jabatan dan para pejabatnya.

Pada 24 Desember 1946, Negara Indonesia Timur (NIT) secara resmi didirikan setelah Konferensi Denpasar yang berlangsung dari 7 hingga 24 Desember 1946. Negara ini merupakan hasil bentukan Belanda dengan sistem pemerintahan federal, dan menjadikan Kota Makassar sebagai pusat administrasinya. Saat itu, Makassar masih berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda karena keberadaan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) yang kembali mengatur pemerintahan kota melalui pembentukan NIT dengan Makassar sebagai ibu kotanya. Hal ini menjadikan posisi Makassar kembali strategis dan membawa dampak positif bagi perkembangannya. Berbagai fasilitas mulai



⁴ Abu Hamid, et.al. *Perkampungan di perkotaan sebagai wujud protes sosial: kehidupan di perkampungan miskin Kotamadya Ujung Pandang*. Jakarta: Direktorat Jenderal kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1993, hlm. 21.

dibangun di berbagai bidang, seperti infrastruktur jalan, saluran air, perumahan, pertokoan, dan perkantoran.⁵

Pemerintahan Orde Baru merupakan periode yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Awal mula periode ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966. dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret tersebut yang kemudian disalahartikan sebagai surat pemindahan kekuasaan. Soeharto kemudian secara resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Maret 1968 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XLIV/MPRS/1968. Sejak saat itu, Orde Baru menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia, yang dikenal dengan penekanan pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, serta sentralisasi kekuasaan.

Gagasan modernitas masa Orde baru identik dengan pengaturan sosial yang dimana aturan dan kebijakan pemerintah dalam merespon kebutuhan penduduk. Seperti ditetapkannya jalur angkutan umum oleh Perusahaan Daerah (PD) Pengangkutan Ujungpandang, di tahun 1967 guna kelancaran transportasi dalam kota. Kegiatan ekonomi juga didukung dengan aktivitas jual lebih yang lebih tertata dengan dibangunnya tempat berdagang yang permanen seperti yang diberlakukan di Pasar Sentral.⁶ Pembangunan fasilitas fisik di Makassar khususnya di Jalan Irian



Ilham. "Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar Sebagai Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950". *Jurnal SASDAYA: Gadjah mral of Humanities*, Vol 2 No. 1, 2017, hlm. 321-322.

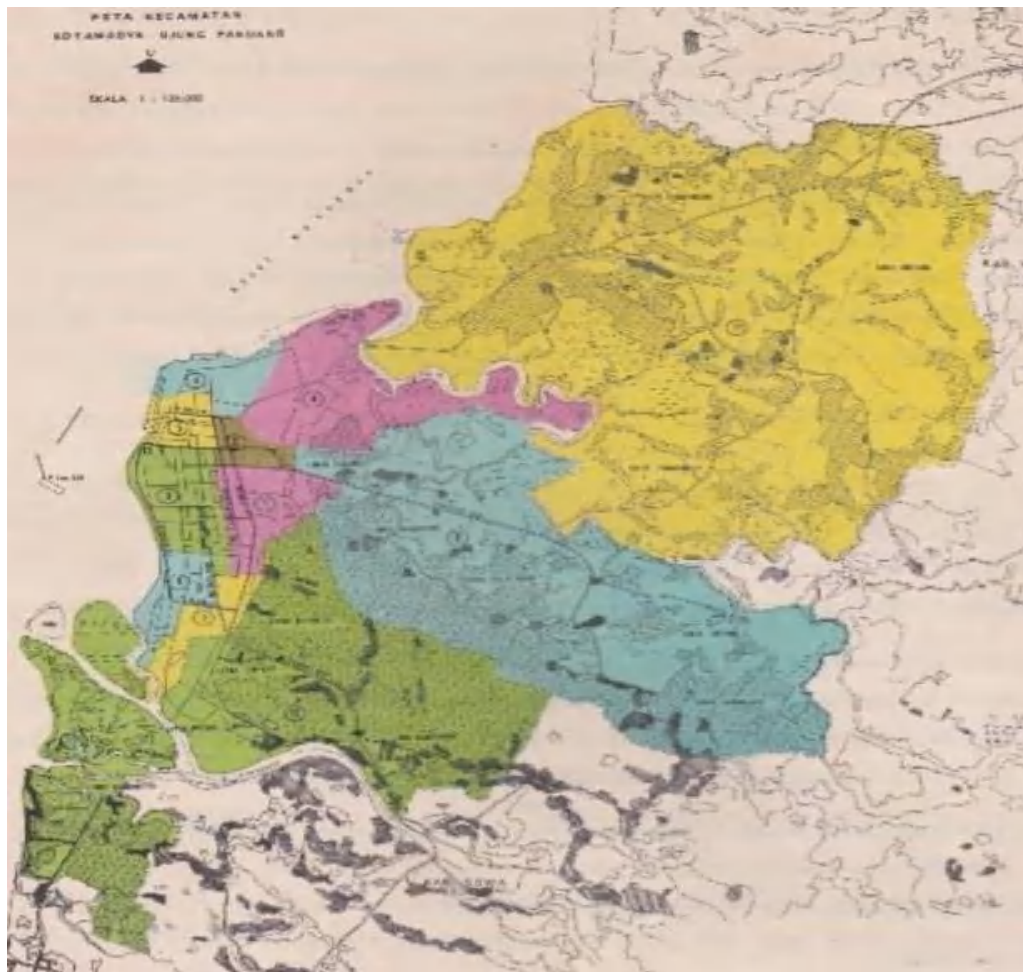
Ilham. "Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar sa Orde Baru". *Jurnal Sejarah Citra Leka*, Vol 4. No. 1. 2019, hlm. 18.

juga dilakukan sejak periode 1960-an. Pembangunan tersebut dilakukan oleh sejumlah pengusaha yang mendirikan rumah toko (ruko) di sepanjang Jalan Irian, seperti salah satu pengusaha yang mendirikan sebuah rumah toko bertingkat dari batu pada tahun 1963 di jalan irian no.193.⁷

Pada tahun 1971, nama Makassar secara resmi diubah menjadi Ujung Pandang seiring dengan kebijakan perluasan wilayah administratif kota. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh posisi Makassar sebagai pusat berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang mengalami perkembangan pesat serta peningkatan jumlah penduduk. Dalam rangka menunjang pertumbuhan tersebut, perluasan wilayah dianggap sebagai suatu keharusan. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971, sebagian wilayah dari Kabupaten Gowa, Maros, serta Pangkajene dan Kepulauan disatukan ke dalam wilayah Kota Makassar, setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan.⁸

⁷ *Arsip Kartografi dan Kearsitekturan Kota Madya Ujung Pandang periode 1949-1983*. “mengenai rencana sebuah rumah toko pada jalan Irian, berisi gambar denah tampak dan tampilan penampang dari bangunan sebuah rumah toko yang didirikan pada jalan Irian tahun 1963”. (Makassar: Badan Arsip dan Saan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). No. Reg. Ya 187.
H.M. Dg. Patompo. *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan Fragmen Pembangunan* (Makassar: Percetakan SMP Frater Ujung Pandang, 1976),





Gambar 2.3 Peta Kota Makassar Sesudah diperluas

Sumber : H.M. Dg Patompo, *Rahasia Menyingkap Tabir Kegelapan: Fragmen Revolusioner Pembangunan* (Ujung Pandang: Percetakan SMP Frater Ujung Pandang. 1976), hlm. 28.

2.2 Kondisi Geografis

Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Itu berada nggian 0-25 Meter dari permukaan laut, dengan kemiringan 0-2° ke arah kasinya adalah pada 119°18'27,97" - 119°32'31,03" Bujur Timur dan 18" -5°14'6,49" Lintang Selatan. Selain itu, daerah ini berbatasan dengan



beberapa kota, seperti Kabupaten Pangkajene Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat.⁹

Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, Makassar memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 26 dan 33 derajat Celcius, kelembapan udara 75% hingga 90%, dan curah hujan tahunan rata-rata 318 milimeter dengan jumlah hari hujan rata-rata 177 hari pertahun. Kecepatan angin rata-rata 2-3 knot perjam, dan penyinaran matahari rata-rata 51,58%.¹⁰ Seperti di daerah lain di Indonesia, Makassar memiliki dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan Oktober hingga April dan dipengaruhi oleh angin muson barat, yang disebut "bara'" dalam bahasa Makassar. Musim kemarau terjadi dari bulan Mei hingga September dan dipengaruhi oleh angin muson timur, yang disebut "timoro" dalam bahasa Makassar. Angin barubu atau fohn, sering muncul dari tenggara ke Sulawesi Selatan selama musim kemarau dari Juni hingga Juli.¹¹

Kondisi geografis Kota Makassar juga termasuk topografi dan lingkungan alam. Secara umum, topografi Makassar dataran rendah, dengan topografi yang sangat beragam. Selain itu, Kota Makassar memiliki beberapa sumber air, rawa, dan sungai yang sangat penting bagi kehidupan penduduknya. Beberapa wilayah

⁹ Kotamadya Ujung Pandang dalam angka Tahun 1969 (Badan Pusat Statistik Kotamadya Ujung Pandang).



Andi Mulya Sultani. "Perkembangan Kotamadya Ujung Pandang 1971-Makassar: *Skripsi* Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas lin. 2007), hlm.15.

Andi Mulya Sultani, *Perkembangan Kotamadya*, hlm. 16.

rawa dan sekitar pantai Kota Makassar masih didominasi oleh flora seperti mangrove, nipah dan lain-lain. Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo adalah dua sungai utama yang mengalir melintasi Kota Makassar, yang memiliki peran penting dan nilai sejarah untuk pertumbuhannya.¹²

2.3 Kondisi Penduduk

Penduduk memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan suatu kota. Hal ini terlihat jelas pada perkembangan Kota Makassar, yang berfungsi sebagai pusat administrasi di Sulawesi Selatan. Sebagai ibu kota provinsi, Makassar setiap tahunnya mencatatkan penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Misalnya, jumlah penduduk di wilayah Afdeling Makassar, yang mencakup Kota Makassar, Tallo, serta pulau-pulau di sekitarnya, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1852, jumlah penduduk tercatat sekitar 33.512 jiwa, meningkat dari 24.000 jiwa pada tahun 1847. Jumlah tersebut terdiri atas 740 orang Eropa, 1.918 orang Tionghoa, serta 30.857 orang Bumiputra dan kelompok Timur Asing lainnya.¹³ Sementara itu, pada tahun 1930, tercatat hampir 3.500 orang Eropa, lebih dari 15.000 orang Tionghoa, dan lebih dari 65.000 orang Bumiputra.¹⁴

¹² Alberth Fernando T. "Bangunan-Bangunan Gereja Pada Masa Kolonial Belanda Makassar". (Makassar: *Skripsi* Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. 2013), hlm. 59.

¹³ Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Perdagangan Maritim* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002),

Heather Sutherland, *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Perdagangan dan Kota di Abad ke-18*, Dalam Dias Pradadimara dan



Antara tahun 1930 hingga 1961, jumlah penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar 90.000 jiwa menjadi sekitar 400.000 jiwa. Berdasarkan laporan Wali Kota H. M. Daeng Patompo (1966–1978) pada tahun 1976, tercatat bahwa jumlah penduduk Makassar pada tahun 1966 mencapai kurang lebih 424.143 jiwa. Empat tahun kemudian, pada tahun 1970, angka ini bertambah menjadi 432.240 jiwa. Sementara itu, menurut data dari kantor statistik, pada tahun 1985 jumlah penduduk telah meningkat menjadi 778.593 jiwa. Pertumbuhan penduduk sejak tahun 1947 hingga 1966 sebagian besar dipengaruhi oleh proses urbanisasi.¹⁵

Tabel 2.1 Perkembangan Penduduk Kotamadya Makassar 1965-1980.

Tahun	Jumlah Penduduk/Jiwa
1965	415.826
1966	424.143
1967	432.696
1968	445.678
1969	450.104
1970	432.242
1971	553.872
1972	561.328
1973	564.482



1 A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 187.

Anwar Arifin, *Pergulatan Politik di Makassar 1946-1966* (Tangerang: Pustaka Irvan, 2019), hlm. 31.

1974	575.771
1975	561.501
1976	596.876
1977	602.422
1978	602.916
1979	633.985
1980	708.465

Sumber : Badan Pusat Statistik Kotamadya Ujung Pandang. (Kotamadya Ujung Pandang dalam angka Tahun 1978).

Sebagian besar penduduk yang menetap di Kota Makassar berasal dari suku Bugis dan Makassar. Kedua kelompok etnis ini umumnya memiliki keahlian dalam bidang perdagangan serta keterampilan dalam pelayaran, baik dalam lingkup domestik maupun antarwilayah di nusantara. Kemampuan tersebut didukung oleh letak geografis Makassar yang sangat strategis, berada di bagian tengah kepulauan Indonesia, sehingga memudahkan interaksi dan hubungan dengan masyarakat dari berbagai daerah di nusantara.

Pertumbuhan jumlah penduduk di kota-kota besar, khususnya yang terletak di kawasan pesisir, telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana permukiman serta fasilitas penunjang lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain



masuk yang dilakukan oleh para pedagang, pengusaha, dan kaum wan, perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan untuk

memperoleh lapangan pekerjaan, serta urbanisasi yang didorong oleh keinginan masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan di kota.¹⁶

Jumlah penduduk Kota Makassar yang besar terdiri dari beragam suku, baik yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi. Keberagaman etnis yang menetap di kota ini turut membentuk dinamika sosial masyarakat dengan ragam jenis pekerjaan. Selain bergerak di sektor perdagangan dan usaha, jenis pekerjaan yang dijalani penduduk juga bervariasi tergantung pada latar belakang etnis mereka.¹⁷ Suku Bugis dan Makassar merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbanyak, disusul oleh suku-suku lain dari Sulawesi seperti Toraja dan Mandar. Ada pula pendatang dari luar Sulawesi Selatan seperti suku Ambon, Timor, Bima, Buton, serta etnis Tionghoa. Keberagaman suku ini memperkaya kehidupan sosial dan budaya di Kota Makassar, menjadikannya semakin heterogen.¹⁸

2.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mayoritas penduduk yang tinggal di Kota Makassar saat ini berasal dari suku Bugis-Makassar, meskipun terdapat pula suku-suku lainnya. Karena itu, struktur sosial masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang pada dasarnya mengikuti

¹⁶ Nur Jannah Jamal. “Perumahan Rakyat Kota Makassar 1927-1974”. (Makassar: *Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin*. 2016), hlm. 28.

¹⁷ Syahrudin Mansyur. “Konstruksi Baru Pameran Museum Kota ”. (Depok: *Tesis Universitas Indonesia*, 2010), hlm. 34.

Abu Hamid, et.al. *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Protes Sosial* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan .985), hlm. 39-40.



pola sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat Bugis-Makassar di wilayah lain. H.J. Friedericy menyimpulkan bahwa struktur sosial masyarakat Sulawesi Selatan terbagi ke dalam tiga tingkat atau lapisan sosial. Pertama, *anakarung*, yakni kelompok bangsawan atau keluarga kerajaan. Kedua, *maradeka*, yaitu golongan rakyat biasa. Ketiga, *ata*, yang merujuk pada lapisan hamba sahaya.¹⁹

Stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis Makassar, seperti yang terbagi dalam beberapa golongan, memiliki peranan penting dalam membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka, termasuk di Kota Makassar. Namun, dalam perkembangan masyarakat Kota Makassar saat ini, pengelompokan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Friedericy mulai mengalami pergeseran atau menjadi kurang terlihat. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan di bidang pendidikan dan agama, serta yang paling utama adalah sikap terbuka masyarakat dalam menerima perubahan dan realitas sosial yang ada.²⁰

Masyarakat Kota Makassar saat ini berasal dari beragam suku dan bangsa, dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kehidupan beragama mereka didukung oleh keberadaan berbagai tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, dan langgar. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Makassar. Pada tahun 1996, jumlah pemeluk Islam mencapai 969.210 orang, sementara umat Katolik berjumlah 37.873 orang,



Mattulada. "Kebudayaan Bugis Makassar". *Artikel: Universitas din*, hlm. 19-20.

Mattulada, *Kebudayaan Bugis*, hlm. 25.

Protestan 74.213 orang, Hindu 2.700 orang, dan Buddha 23.172 orang.²¹ Secara umum, kehidupan beragama di Kota Makassar berlangsung harmonis. Kondisi ini tercipta berkat adanya kerukunan dan toleransi antarumat beragama, yang menjadikan wilayah ini tetap aman dan kondusif, meskipun masyarakatnya berasal dari latar belakang etnis yang beragam

Fondasi perkembangan Kota Makassar sebagai pelabuhan utama sekaligus pusat aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Indonesia Timur telah diletakkan sejak abad ke-16 hingga ke-17 oleh Kesultanan Gowa. Pada tahun 1970, pemerintah pusat menyalurkan bantuan pembangunan kepada setiap kabupaten dan kotamadya sebesar 50 rupiah per kapita. Kota Makassar sebagai salah satu penerima, memperoleh dana sebesar Rp21.147.000 pada tahun tersebut. Bantuan tersebut kemudian meningkat menjadi Rp34.350.000 pada tahun 1971, naik lagi menjadi Rp47.400.000 pada tahun 1972, dan mencapai Rp67.283.206 pada tahun 1973.²²

Bantuan dana pembangunan dari pemerintah pusat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Pemerintah kota mulai membangun berbagai fasilitas umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya nyata juga dilakukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, kekurangan kebutuhan dasar, serta rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ekonomi Kota Makassar pada dekade 1960-an mencerminkan dampak



Kotamadya Ujung Pandang dalam angka Tahun 1999 (Badan Pusat Kotamadya Ujung Pandang).

H.M. Dg. Patompo, *Rahasia Menyingkap*, hlm. 60-61.

besar dari ketidakstabilan sosial-politik yang sebelumnya melanda wilayah tersebut. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama terkait pembangunan wilayah perkotaan. Meskipun menghadapi hambatan, pemerintah Kota Makassar tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan kebijakan pemungutan pajak di sejumlah sektor penting, seperti penginapan, losmen, penggunaan air, warung, dan transportasi.²³



Fitri Ramdayani M. "Perjudian di Kota Makassar Tahun 1967-1974".
ur: *Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas
lin, 2021), hlm. 29.